

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Semarang

Halaman 8

Dewan Pertanyakan Kinerja Pemkab

UNGERAN - Belum adanya progres pelaksanaan proyek pembangunan 2018 hingga bulan Juni ini, membuat kalangan DPRD Kabupaten Semarang geram. Dewan menuding pemkab tidak serius melaksanakan pembangunan yang sudah diprogramkan.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengungkapkan, proyek pembangunan harus segera dilaksanakan mengingat perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan. "Sampai hari ini belum ada tanda-tanda pembangunan," kata Bambang Krebo, sapaan akrab Bambang Kusriyanto, Selasa (5/6).

Dikatakan Krebo, beberapa proyek dengan nilai fantastis sudah direncanakan, bahkan sudah dianggarkan. "Sampai hari ini proyek yang anggarannya besar di atas Rp 500 juta sampai Rp 55 miliar belum kelihatan tanda-tanda dimulainya pekerjaan di lapangan," katanya.

Ia mencontohkan proyek dengan nilai besar yang masih mangkrak padahal sudah dianggarkan yaitu pembangunan RSUD Ungaran senilai Rp 55 miliar. Juga pembangunan plaza Ungaran dengan nilai Rp 2 miliar.

Hingga kini ke dua proyek besar tersebut belum juga dilaksanakan oleh Pemkab Semarang. Bambang Krebo juga mencon-

tohkan proyek yang hingga kini belum dikerjakan yaitu pembangunan gedung DPRD Kabupaten Semarang senilai Rp 2 miliar. "Seandainya pekerjaan sudah dimulai sejak awal tahun, hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat," katanya.

Kinerja eksekutif yang seperti ini akan menjadi vahan evaluasi legislatif. "Setiap selesai pembahasan anggaran DPRD selalu mengingatkan agar awal tahun proyek pembangunan bisa segera dimulai sehingga hasilnya bisa dinikmati masyarakat di tahun yang sama," tegasnya.

Pertanyaan kenapa proyek-proyek tersebut tidak segera dikerjakan bahkan terkesan dibiarkan oleh pihak eksekutif, kerap muncul di semua kalangan dewan. Bahkan hal itu sudah ditanyakan langsung ke eksekutif, namun jawabannya tidak proporsional. "OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kalau ditanya sudah masuk ULP tapi kalau ULP yang ditanya OPD belum memasukan pekerjaan yang dilelang," ujarnya.

Pihaknya menilai, eksekutif tidak serius melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Semarang. Hal itu terbukti dari tidak adanya sinkronisasi seperti di ULP dan OPD. "Sebetulnya yang benar yang mana selalu menjadi pertanyaan masyarakat," ujarnya. (ewb/zal)